

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Profil dan
Kebijakan Teknis*

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada *stakeholder* dan *shareholder*. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses *governance*, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan BPKP berperan dalam mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat BPKP sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

- ✚ Inspektur : **Buntoro**
- ✚ Korwas Kelompok PFA Bidang Pelayanan Konsultasi dan Penjaminan Mutu : **Meidina Sari**
- ✚ Korwas Kelompok PFA Bidang Penjaminan Akuntabilitas : **Kasmual**
- ✚ Korwas Kelompok JFA Bidang Penegakan Integritas dan Penanganan Pengaduan : **Kustanto**
- ✚ Kepala Sub Bagian Umum : **Ucu Rahmat**

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Inspektorat BPKP Semester I Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Inspektorat BPKP. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Modul Persediaan, Aset Tetap dan GLP. SAKTI Modul GLP dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SAKTI Modul Persediaan dan Aset Tetap adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Inspektorat BPKP menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis

akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Inspektorat BPKP dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Inspektorat BPKP Semester I Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi diakui apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan, diakui apabila terdapat

ada peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Tarif Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.
- Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Jalan, Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
- Pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu dicatat sebagai koreksi terhadap nilai aset yang bersangkutan pada saat pengembalian tersebut telah disetorkan ke Kas Negara.

*Penyusutan Aset
Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap yang

dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Barang Bercorak Kesenian)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang

Piutang Jangka Panjang

diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima dimuka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Pembelian Persediaan yang belum dibayar dari Kas Negara (belum terbit SP2D) diakui sebagai Belanja yang Masih Harus Dibayar pada tanggal Neraca.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

A.6. Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Semester I Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2022, pada satuan kerja Inspektorat BPKP tidak terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional PN VII memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam rangka RKP.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pagu Anggaran Inspektorat BPKP per 30 Juni 2023 semula sebesar Rp11.211.220.000,00 dan dilakukan revisi menjadi Rp11.432.156.000,00. Adapun revisi tersebut merupakan penambahan pagu belanja Pegawai dan belanja Modal.

Rincian pagu Pendapatan dan Belanja Inspektorat BPKP per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)			
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total Anggaran Belanja
Anggaran Semula	7.962.990.000	3.248.230.000	0	11.211.220.000
Penambahan Belanja Pegawai dan Belanja Modal	91.500.000	0	129.436.000	220.936.000
Anggaran Akhir	8.054.490.000	3.248.230.000	129.436.000	11.432.156.000

Sedangkan apabila dilihat dari program, maka perubahan belanja adalah sebagai berikut:

Program	Jumlah Anggaran (Rp)	
	Semula	Menjadi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	8.796.220.000	9.017.156.000
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	2.415.000.000	2.415.000.000
Total	11.211.220.000	11.432.156.000

*Pendapatan Negara dan Hibah
Rp1.440.000*

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp1.440.000,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Inspektorat BPKP merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Realisasi PNBP Lainnya per 30 Juni 2023 mengalami penurunan sebesar Rp30.611.974,00 atau 95,51 persen dibandingkan realisasi PNBP per 30 Juni 2022 sebesar Rp32.051.974,00 disebabkan tidak adanya Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya.

Perbandingan realisasi PNBPN per 30 Juni 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni 2023 dan 2022

Uraian Jenis PNBPN	Realisasi PNBPN (Rp)		Naik / (Turun)	
	30 Jun 2023	30 Jun 2022	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	31.999.999	(31.999.999)	(100,00)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.080.000	51.975	1.028.025	1977,92
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	360.000	0	360.000	~
Total	1.440.000	32.051.974	(30.611.974)	(95,51)

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan merupakan biaya sewa rumah dinas pegawai a.n Dharu Wicaksono yang terletak di Komplek BPKP Kota Tangerang sesuai Surat keputusan Sekretaris Utama Nomor KP.05.02/KEP-809/SU/05/2022 Tanggal 11 Oktober 2022.

Belanja Negara
Rp5.930.926.254

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja per 30 Juni 2023 setelah dikurangi pengembalian belanja adalah sebesar Rp5.930.926.254,00 atau 51,88 persen dari anggaran sebesar Rp11.432.156.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja menurut program per 30 Juni 2023 disajikan pada Tabel 2 di bawah ini

Tabel 2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Menurut Program per 30 Juni 2023

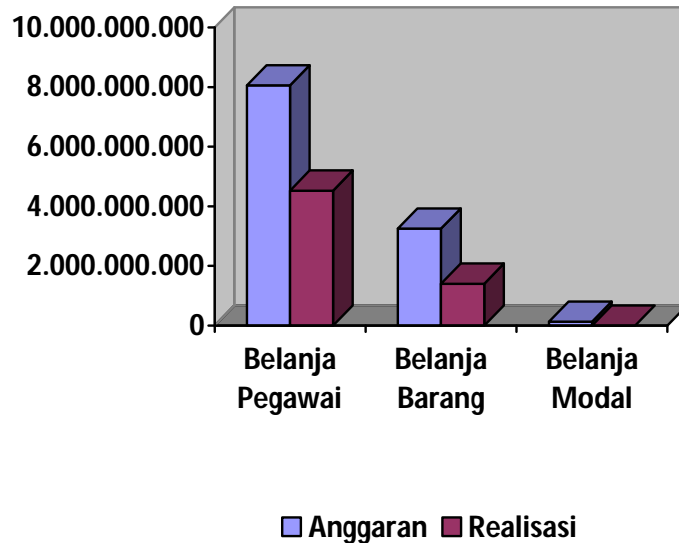
Kode Prog.	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
WA	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	9.017.156.000	4.852.581.293	53,81
CH	Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	2.415.000.000	1.078.344.961	44,65
Jumlah		11.432.156.000	5.930.926.254	51,88

Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya disajikan pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3
Rincian Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja
per 30 Juni 2023

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
51	Belanja Pegawai	8.054.490.000	4.527.130.927	56,21
52	Belanja Barang	3.248.230.000	1.403.795.327	43,22
53	Belanja Modal	129.436.000	0	0,00
Jumlah		11.432.156.000	5.930.926.254	51,88

Komposisi anggaran dan realisasi belanja disajikan dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja per 30 Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.551.095.869,00 atau 26,15 persen dibandingkan realisasi belanja per 30 Juni 2022 disebabkan adanya kenaikan belanja barang, kenaikan belanja pegawai dan penurunan belanja modal.

Perbandingan realisasi belanja per 30 Juni 2023 dan 2022 disajikan pada

Tabel 4
Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2023 dan 2022

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
		30 Jun 2023	30 Jun 2022	Jumlah (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	4.527.130.927	3.430.787.417	1.096.343.510	31,96
52	Belanja Barang	1.403.795.327	939.543.968	464.251.359	49,41
53	Belanja Modal	0	9.499.000	(9.499.000)	~
	Total	5.930.926.254	4.379.830.385	1.551.095.869	26,15

Belanja Pegawai
Rp4.527.130.927

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2023 dan 2022 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp4.527.130.927,00 dan Rp3.430.787.417,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2023 disajikan pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
per 30 Juni 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.630.393.000	2.034.869.613	56,05
Belanja Lembur	105.903.000	55.397.000	52,31
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	4.318.194.000	2.436.864.314	56,43
Total	8.054.490.000	4.527.130.927	56,21

Realisasi belanja pegawai (*netto*) sebesar Rp4.527.130.927,00 berasal dari belanja pegawai (*bruto*) sebesar Rp4.534.385.743,00 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp7.254.816,00.

Dibandingkan dengan realisasi per 30 Juni 2022, terdapat kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.096.343.510,00 atau 31,96 persen disebabkan adanya mutasi penambahan pegawai pada tahun berjalan yang mempengaruhi naiknya realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS serta Tunjangan Kinerja.

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
per 30 Juni 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	30 Jun 2023	30 Jun 2022	Jumlah (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.034.869.613	1.531.039.464	503.830.149	32,91
Belanja Lembur	55.397.000	65.151.000	(9.754.000)	(14,97)
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	2.436.864.314	1.834.596.953	602.267.361	32,83
Total	4.527.130.927	3.430.787.417	1.096.343.510	31,96

B.2.2. Belanja Barang

Belanja Barang
Rp1.403.795.327

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2023 dan 2022 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp1.403.795.327,00 dan Rp939.543.968,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2023

disajikan pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	345.622.000	125.425.600	36,29
Belanja Barang Non Operasional	8.160.000	3.400.000	41,67
Belanja Barang Persediaan	142.198.000	37.255.873	26,20
Belanja Jasa	2.154.000	476.500	22,12
Belanja Pemeliharaan	154.901.000	51.081.796	32,98
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.595.195.000	1.186.155.558	45,71
Total	3.248.230.000	1.403.795.327	43,22

Realisasi belanja barang (*netto*) sebesar Rp1.403.795.327,00 berasal dari belanja barang (*bruto*) sebesar Rp1.403.795.327,00 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp0,00.

Dibandingkan dengan realisasi per 30 Juni 2022, terdapat kenaikan realisasi Belanja Barang sebesar Rp464.251.359,00 atau 49,41 persen antara lain disebabkan adanya kenaikan belanja barang operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan perjalanan dinas dalam negeri. Perbandingan realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	30 Jun 2023	30 Jun 2022	Jumlah (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	125.425.600	117.653.500	7.772.100	6,61
Belanja Barang Non Operasional	3.400.000	3.400.000	0	0,00
Belanja Barang Persediaan	37.255.873	68.064.060	(30.808.187)	(45,26)
Belanja Jasa	476.500	0	476.500	~
Belanja Pemeliharaan	51.081.796	33.090.074	17.991.722	54,37
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.186.155.558	717.336.334	468.819.224	65,36
Total	1.403.795.327	939.543.968	464.251.359	49,41

B.2.3. Belanja Modal

Belanja Modal Rp0

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2023 dan 2022 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp0,00 dan

Rp9.499.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun per 30 Juni 2023 disajikan pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.436.000	0	0,00
Total	129.436.000	0	0,00

Dibandingkan dengan realisasi Per 30 Juni 2022, terdapat penurunan realisasi Belanja Modal sebesar Rp9.499.000,00 atau 100 persen antara lain disebabkan anggaran belanja modal ditambahkan ke anggaran DIPA Inspektorat BPKP pada bulan Juni 2023 dan rencana penyerapan belanja modal akan dilakukan pada bulan Juli 2023. Perbandingan realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	30 Jun 2023	30 Jun 2022	Jumlah (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	9.499.000	(9.499.000)	(100,00)
Total	0	9.499.000	(9.499.000)	(100,00)

B.2.3. Belanja Penanganan Pandemi COVID-19

Inspektorat BPKP tidak mendapatkan anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp188.779.626

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp188.779.626,00 dan Rp125.908.013,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 11 berikut ini:

Tabel 11
Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

No	Aset Lancar	30 Juni 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	60.000.000	0
2	Piutang Bukan Pajak	180.000	0
3	Persediaan	128.599.626	125.908.013
	Total	188.779.626	125.908.013

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp60.000.000

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp60.000.000,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal Neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	30 Juni 2023 (Rp)
1	Uang Tunai di Brankas Bendahara	1.668.600
2	Uang di Rekening Bank Bendahara	45.516.250
3	Uang Muka/ Voucher	0
4	Kuitansi UP yang belum di SP2D-kan	12.815.185
5	Selisih Kas	(35)
	Jumlah	60.000.000

Piutang Bukan Pajak
Rp180.000

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp180.000,00 dan Rp0,00. Piutang ini merupakan pembayaran sewa rumah dinas bulan Juli 2023 a.n Dharu Wicaksono yang dipotong langsung dari Gaji Induk bulan Juli 2023.

Persediaan Rp
Rp128.599.626

C.1.3. Persediaan

Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp128.599.626,00 dan Rp125.908.013,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 12 berikut ini:

Tabel 12
Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Jenis Persediaan	30 Juni 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Barang Konsumsi	128.599.626	125.908.013
Jumlah	128.599.626	125.908.013

Dari keseluruhan persediaan pada Inspektorat BPKP sebesar Rp128.599.626,00, terdapat persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp0,00.

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap
Rp560.773.534

Nilai buku Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp560.773.534,00 dan Rp628.329.254,00, yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 13 berikut ini:

Tabel 13
Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	30 Juni 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	2.204.306.144	2.268.549.426
2	Aset Tetap Lainnya	21.592.925	21.592.925
3	Aset Tetap yang Belum Diregister	61.792.000	0
	Nilai Perolehan	2.287.691.069	2.290.142.351
4	Akumulasi Penyusutan	(1.726.917.535)	(1.661.813.097)
	Nilai Buku	560.773.534	628.329.254

C.2.1. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp2.204.306.144

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp2.204.306.144,00 dan Rp2.268.549.426,00. Akumulasi Penyusutan

Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 sebesar Rp1.726.917.535,00 sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp477.388.609,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	2.268.549.426
Mutasi Keluar:	
- Transfer Keluar ke Perwakilan Kalimantan Timur	(33.000.000)
- Transfer Keluar ke Biro Umum BPKP	(3.577.032)
- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(27.666.250)
Jumlah Mutasi Keluar	(64.243.282)
Nilai Perolehan per 30 Juni 2023	2.204.306.144
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(1.726.917.535)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	477.388.609

Transaksi pengurangan nilai Peralatan dan Mesin sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

- Transfer Keluar sebesar Rp36.577.032,00 merupakan pengeluaran BMN dari neraca satker atas transaksi perpindahan BMN antar satker di lingkungan BPKP sebagaimana dijelaskan pada Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas.
- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp27.666.250,00 merupakan perubahan kondisi BMN rusak berat yang semula dari Peralatan Mesin berubah menjadi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah.

Selain nilai Peralatan dan Mesin tersebut di atas, terdapat Peralatan dan Mesin yang tidak dicatat di Neraca, namun dicatat secara ekstrakomptabel karena nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp0,00.

Aset Tetap Lainnya
Rp21.592.925

C.2.2. Aset Tetap Lainnya

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp21.592.925,00 dan Rp21.592.925,00 yang merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 sebesar Rp0,00, sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp21.592.925,00.

**Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap**
(Rp1.726.917.535)

C.2.3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar minus Rp1.726.917.535,00 dan minus Rp1.661.813.097,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan KDP.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 disajikan pada Tabel 14 berikut ini:

Tabel 14
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	2.204.306.144	(1.726.917.535)	477.388.609
2	Aset Tetap Lainnya	21.592.925	0	21.592.925
	Total	2.225.899.069	(1.726.917.535)	498.981.534

Perbandingan mutasi akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan Semester I Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo per 31/12/2022 (Rp)	Saldo per 30/06/2023 (Rp)	Mutasi (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6)	(7) = (6) - (5)
1	Peralatan dan Mesin	1.661.813.097	1.726.917.535	65.104.438	116.972.720	51.868.282
	Total	1.661.813.097	1.726.917.535	65.104.438	116.972.720	51.868.282

Penjelasan atas selisih tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Peralatan dan Mesin	Jumlah
1	Transfer Keluar ke Perwakilan Kalimantan Timur	20.625.000	20.625.000
2	Transfer Keluar ke Biro Umum BPKP	3.577.032	3.577.032
3	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	27.666.250	27.666.250
	Total	51.868.282	51.868.282

C.2.4. Aset Tetap yang Belum Diregister

**Aset Tetap yang
Belum Diregister**
Rp61.792.000

Nilai perolehan Aset Tetap yang Belum Diregister per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp61.792.000,00 dan Rp0,00. Aset Tetap yang Belum Diregister merupakan BAST peralatan dan mesin dari pihak ketiga yang sudah dicatat pada aplikasi SAKTI tetapi belum dibuatkan SPM.

C.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya Rp
Rp344.840.666

Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp344.840.666,00 dan Rp431.050.832,00, merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Rincian Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 15 berikut ini:

Tabel 15
Rincian Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	30 Juni 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	689.681.330	689.681.330
2	Aset Lain-Lain	27.666.250	0
	Nilai Perolehan	717.347.580	689.681.330
3	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(27.666.250)	0
4	Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(344.840.664)	(258.630.498)
	Nilai Buku	344.840.666	431.050.832

Aset Tak Berwujud
Rp689.681.330

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp689.681.330,00 dan Rp689.681.330,00. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp344.840.664,00 sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp344.840.666,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik, yang digunakan untuk menunjang operasional kantor berupa *Software* yang merupakan Pengembangan *Dashboard* CITRA (CACM Inspektorat) dan lisensi.

Mutasi nilai Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	689.681.330
Nilai Perolehan per 30 Juni 2023	689.681.330
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(344.840.664)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	344.840.666

C.3.2. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp27.666.250

Nilai perolehan Aset Lain-Lain per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp27.666.250,00 dan Rp0,00 yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Inspektorat BPKP. Aset tersebut dalam proses penghapusan dari BMN, sehingga tidak digolongkan dalam kategori Aset Tetap namun digolongkan ke dalam Aset Lain-Lain.

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 30 Juni 2023 sebesar

Rp27.666.250,00, sehingga nilai buku Aset Lain-Lain pada tanggal pelaporan sebesar Rp0,00.

Transaksi penambahan aset lain-lain berupa reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya sebesar Rp27.666.250,00 merupakan transaksi yang disebabkan karena perubahan kondisi aset yang semula baik atau rusak ringan menjadi rusak berat.

Pengurangan saldo Aset Lain-lain disebabkan telah dilakukan usulan penghapusan kepada Sekretaris Utama BPKP sesuai surat Inspektur BPKP Nomor PL.07/S-372/IN/4/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang Usulan Persetujuan Penghapusan BMN berupa Peralatan dan Mesin pada Inspektorat BPKP.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Lainnya Rp27.666.250*

C.3.3. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp27.666.250,00 dan Rp0,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya berupa Aset Lain-Lain dan disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tersebut. Saldo per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 terdiri atas:

No	Uraian	30 Juni 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	27.666.250	0
	Total	27.666.250	0

*Akumulasi Amortisasi
Aset Lainnya
Rp344.840.664*

C.3.4. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp344.840.664,00 dan Rp258.630.498,00. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya berupa Aset Tak Berwujud dan disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tersebut. Saldo per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 terdiri atas:

No	Uraian	30 Juni 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	344.840.664	258.630.498
	Total	344.840.664	258.630.498

Perbandingan mutasi akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo per 31/12/2022 (Rp)	Saldo per 30/06/2023 (Rp)	Mutasi (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6)	(7) = (6) - (5)
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	258.630.498	344.840.664	86.210.166	86.210,166	0
	Total	258.630.498	344.840.664	86.210.166	86,210,166	0

**Kewajiban Jangka
Pendek
Rp840.361.480**

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp840.361.480,00 dan Rp19.174.000,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 16 berikut ini:

Tabel 16
Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	30 Juni 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	705.754.295	19.174.000
2	Utang Yang Belum Ditagihkan	74.607.185	0
3	Uang Muka dari KPPN	60.000.000	0
	Total	840.361.480	19.174.000

**Utang Kepada Pihak
Ketiga Rp705.754.295**

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp705.754.295,00 dan Rp19.174.000,00. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	
Gaji Induk bulan Juli 2023	240.720.355
Tukin bulan Juli 2023	456.426.940
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	697.147.295
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	
Honor PPNPN bulan Juni 2023	8.607.000
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	8.607.000
Total	705.754.295

C.4.2. Utang Yang Belum Ditagihkan

**Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp74.607.185**

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp74.607.185,00 dan Rp0,00. Utang yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas

pengakuan utang karena adanya Kuitansi yang sudah dicatat tetapi belum SPM dan adanya BAST dari pihak ketiga yang sudah dicatat tetapi belum dibuatkan SPM. Adapun rincian Utang yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kuitansi yang sudah dicatat tetapi belum SPM	12.815.185
2	BAST dari pihak ketiga yang sudah dicatat tetapi belum dibuatkan SPM	61.792.000
	Total	74.607.185

*Uang Muka dari
KPPN Rp60.000.000*

C.4.2. Uang Muka dari KPPN

Nilai Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5. Ekuitas

*Ekuitas
Rp254.032.346*

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp254.032.346,00 dan Rp1.166.114.099,00. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan
Operasional
(Rp6.848.727.007)*

D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar minus Rp6.829.553.007,00 dan minus Rp5.138.532.868,00. Jumlah per 30 Juni 2023 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp1.260.000,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp6.830.813.007,00.

*Pendapatan
Operasional
Rp1.260.000*

D.1.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.260.000,00 dan Rp51.975,00. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp1.260.000*

D.1.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.260.000,00 dan Rp51.975,00.

Rincian PNBP per 30 Juni 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 17 berikut ini:

Tabel 17
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
per 30 Juni 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	30 Jun 2023	30 Jun 2022	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.260.000	51.975	1.208.025	2324,24
Total	1.260.000	51.975	1.208.025	2324,24

Jika realisasi per 30 Juni 2023 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih antara LO dan LRA sebagaimana disajikan pada Tabel 18 berikut ini:

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Pendapatan Operasional
per 30 Juni 2023 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.260.000	1.080.000	180.000
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	360.000	(360.000)
Total	1.260.000	1.440.000	(180.000)

Selisih realisasi sebesar Rp180.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Pembayaran sewa rumah dinas bulan Juli 2023	180.000

Beban Operasional
Rp6.830.813.007

D.1.2. Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp6.830.813.007,00 dan Rp5.138.584.843,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional. Rincian Beban Operasional per 30 Juni 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 19 berikut ini:

Tabel 19
Rincian Beban Operasional per 30 Juni 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	30 Jun 2023	30 Jun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Pegawai	5.205.104.222	3.993.654.762	1.211.449.460	30,33
Beban Persediaan	39.489.260	44.361.977	(4.872.717)	(10,98)
Beban Barang dan Jasa	138.766.300	129.003.500	9.762.800	7,57
Beban Pemeliharaan	57.044.441	33.090.074	23.954.367	72,39
Beban Perjalanan Dinas	1.187.225.898	717.336.334	469.889.564	65,50
Beban Penyusutan dan Amortisasi	203.182.886	221.138.196	(17.955.310)	(8,12)
Total	6.830.813.007	5.138.584.843	1.692.228.164	32,93

Beban Pegawai
Rp5.205.104.222

D.1.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.205.104.222,00 dan Rp3.993.654.762,00. Kenaikan Beban Pegawai sebesar Rp1.211.449.460,00 disebabkan adanya mutasi penambahan pegawai pada tahun berjalan yang mempengaruhi naiknya realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS serta Tunjangan Kinerja.

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 20 berikut ini:

Tabel 20
Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	30 Jun 2023	30 Jun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	2.256.415.968	1.951.825.630	304.590.338	15,61
Beban Uang Lembur	55.397.000	65.151.000	(9.754.000)	(14,97)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	2.893.291.254	1.976.678.132	916.613.122	46,37
Total	5.205.104.222	3.993.654.762	1.211.449.460	30,33

Jika realisasi LO per 30 Juni 2023 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama terdapat selisih sebesar Rp677.973.295,00, sebagaimana disajikan pada Tabel 21 berikut ini:

Tabel 21
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pegawai
per 30 Juni 2023 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	2.256.415.968	2.034.869.613	221.546.355
Beban Lembur	55.397.000	55.397.000	0
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	2.893.291.254	2.436.864.314	456.426.940
Total	5.205.104.222	4.527.130.927	677.973.295

Selisih realisasi Beban/Belanja Pegawai sebesar Rp677.973.295,00 tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Jurnal Balik Uang Makan bulan Desember 2022	(19.174.000)
Gaji Induk bulan Juli 2023	240.720.355
Tukin bulan Juli 2023	456.426.940
Total	677.973.295

D.1.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp39.489.260

Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp39.489.260,00 dan Rp44.361.977,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat pemakaian/konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Kenaikan Beban Persediaan tersebut dikarenakan bertambahnya pemakaian barang-barang habis pakai selama per 30 Juni 2023.

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 22 berikut ini:

Tabel 22
Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	30 Jun 2023	30 Jun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Persediaan Konsumsi	39.489.260	44.361.977	(4.872.717)	(10,98)
Total	39.489.260	44.361.977	(4.872.717)	(10,98)

Realisasi Belanja Barang Persediaan per 30 Juni 2023 menurut Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp37.255.873,00, sedangkan menurut Laporan Operasional sebesar Rp39.489.260,00. Perbedaan tersebut disebabkan Belanja Barang Persediaan dicatat sebagai perolehan Persediaan di Neraca, sedangkan Beban Persediaan merupakan pemakaian Persediaan selama per 30 Juni 2023.

*Beban Barang dan
Jasa Rp138.766.300*

D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp138.766.300,00 dan Rp129.003.500,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Kenaikan Beban Barang dan Jasa sebesar Rp9.762.800,00 dikarenakan adanya kenaikan beban barang operasional dan beban jasa.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 23 berikut ini:

Tabel 23
Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	30 Jun 2023	30 Jun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Barang Operasional	134.889.800	125.603.500	9.286.300	7,39
Beban Barang Non Operasional	3.400.000	3.400.000	0	0,00
Beban Jasa	476.500	0	476.500	~
Total	138.766.300	129.003.500	9.762.800	7,57

Jika realisasi LO per 30 Juni 2023 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama terdapat selisih sebesar Rp9.464.200,00, sebagaimana disajikan pada Tabel 24 berikut ini:

Tabel 24
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa per 30 Juni 2023 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Barang Operasional	134.889.800	125.425.600	9.464.200
Beban Barang Non Operasional	3.400.000	3.400.000	0
Beban Jasa	476.500	476.500	0
Total	138.766.300	129.302.100	9.464.200

Selisih realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp9.464.200,00 tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Honor PPNPN bulan Juni 2023	8.607.000
Kuitansi Barang Operasional yang sudah dicatat tetapi belum SPM	857.200
Total	9.464.200

D.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp57.044.441

Jumlah Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp57.044.441,00 dan Rp33.090.074,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Kenaikan Beban Pemeliharaan tersebut dikarenakan adanya unit peralatan dan mesin yang harus diperbaiki.

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 25 berikut ini:

Tabel 25
Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	30 Jun 2023	30 Jun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.044.441	33.090.074	23.954.367	72,39
Total	57.044.441	33.090.074	23.954.367	72,39

Jika realisasi LO per 30 Juni 2023 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp5.962.645,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 26 berikut ini:

Tabel 26
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pemeliharaan per 30 Juni 2023 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.044.441	51.081.796	5.962.645
Total	57.044.441	51.081.796	5.962.645

Selisih realisasi Beban/Belanja Pemeliharaan sebesar Rp5.962.645,00 tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Kuitansi Pemeliharaan yang sudah dicatat tetapi belum SPM	5.962.645
Total	5.962.645

D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp1.187.225.898*

Jumlah Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.187.225.898,00 dan Rp717.336.334,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Kenaikan Beban Perjalanan Dinas tersebut dikarenakan terdapat kenaikan perjalanan dinas biasa.

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 27 berikut ini:

Tabel 27
Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	30 Jun 2023	30 Jun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Perjalanan Biasa	1.183.280.898	712.386.334	470.894.564	66,10
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.945.000	4.950.000	(1.005.000)	(20,30)
Total	1.187.225.898	717.336.334	469.889.564	65,50

Jika realisasi LO per 30 Juni 2023 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp1.070.340,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 28 berikut ini:

Tabel 28
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Perjalanan Dinas per 30 Juni 2023 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Perjalanan Biasa	1.183.280.898	1.182.705.558	575.340
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.945.000	3.450.000	495.000
Total	1.187.225.898	1.186.155.558	1.070.340

Selisih realisasi Beban/Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp1.070.340,00 tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Kuitansi Perjalanan Dinas yang sudah dicatat tetapi belum SPM	1.070.340
Total	1.070.340

D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp203.182.886

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2023 dan 2022 sebesar Rp203.182.886,00 dan Rp221.138.196,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 29 berikut ini:

Tabel 29
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	30 Jun 2023	30 Jun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	116.972.720	130.439.280	(13.466.560)	(10,32)
Beban Amortisasi Software	86.210.166	90.698.916	(4.488.750)	(4,95)
Total	203.182.886	221.138.196	(17.955.310)	(8,12)

*Beban Khusus
Penanganan
Pandemi COVID-19
Rp0*

D.1.2.7. Beban Khusus Penanganan Pandemi COVID-19

Beban khusus penanganan pandemi COVID-19 pada Inspektorat BPKP sebesar Rp0,00.

*Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional
Rp360.000*

D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp360.000,00 dan Rp31.999.999,00. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2023 sebesar Rp360.000,00 tersebut merupakan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp360.000,00.

*Surplus/(Defisit) dari
Pelepasan Aset Non
Lancar Rp0*

D.2.1. Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp31.999.999,00. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar per 30 Juni 2023 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp31.999.999,00 dikurangi Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp0,00.

*Pendapatan
Pelepasan Aset Non
Lancar Rp57.999.998*

D.2.1.1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp31.999.999,00.

*Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional
Lainnya Rp
360.000*

D.2.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp360.000,00 dan

Rp0,00. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2023 sebesar Rp360.000,00 merupakan selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp360.000,00 dikurangi Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0,00.

*Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya Rp360.000*

D.2.2.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp360.000,00 dan Rp0,00. Kenaikan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut dikarenakan terdapat penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 30 berikut ini:

Tabel 30
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
per 30 Juni 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	30 Jun 2023	30 Jun 2022	Jumlah (Rp)	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	360.000	0	360.000	~
Total	360.000	0	360.000	~

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp1.166.114.099

E.1. Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal per 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.166.114.099,00 dan Rp1.599.776.154,00.

Surplus/(Defisit) LO
(Rp6.829.193.007)

E.2. Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar minus Rp6.829.193.007,00 dan minus Rp5.106.532.869,00. Jumlah tersebut merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

Transaksi Antar Entitas
Rp5.917.111.254

E.3. Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.917.111.254,00 dan Rp4.347.778.411,00. Jumlah Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2023 dan 2022, terdiri atas:

Uraian	30 Jun 2023 (Rp)	30 Jun 2022 (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	5.930.926.254	4.379.830.385
Diterima dari Entitas Lain	(1.440.000)	(32.051.974)
Transfer Keluar	(12.375.000)	0
Total	5.917.111.254	4.347.778.411

Ditagihkan ke Entitas Lain
Rp5.930.926.254

E.3.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.930.926.254,00 dan Rp4.379.830.385,00. Jumlah per 30 Juni 2023 merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara setelah dikurangi pengembalian belanja sampai dengan 30 Juni 2023.

Diterima dari Entitas Lain
(Rp1.440.000)

E.3.2. Diterima dari Entitas Lain

Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar minus Rp1.440.000,00 dan minus Rp32.051.974,00. Jumlah per 30 Juni 2023 merupakan

realisasi penerimaan negara yang telah disetorkan ke Kas Negara setelah dikurangi pengembalian pendapatan sampai dengan 30 Juni 2023.

Transfer Keluar
Rp12.375.000

E.3.3. Transfer Keluar

Jumlah Transfer Masuk per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp12.375.000,00 dan Rp0,00. Transfer keluar merupakan transfer aset antar satuan kerja di lingkungan BPKP. Jumlah per 30 Juni 2023 merupakan jumlah keseluruhan transfer keluar sebesar Rp12.375.000,00 dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp12.375.000,00. Rincian transfer keluar selama 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

No	Satker yang Menerima	Uraian Barang	Jumlah	Nilai
1	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	Notebook	1 Unit	33.000.000
2	Biro Umum BPKP	Sice (Sofa Tamu)	2 Unit	3.577.032
Akumulasi Penyusutan				(33.577.032)
Nilai Buku				0

Ekuitas Akhir Rp
Rp254.032.346

E.4. Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp254.032.346,00 dan Rp841.021.696,00. Jumlah per 30 Juni 2023 merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp1.094.393.826,00 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp859.535.480,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Biaya Bantuan Kedinasan

F.1. Informasi Biaya Bantuan Kedinasan

Selama Semester I Tahun 2023 kegiatan pengawasan Inspektorat BPKP hanya didanai dari DIPA Inspektorat BPKP, tidak terdapat Penugasan Inspektorat BPKP yang didanai dari DIPA mitra kerja.